



## REFORMASI PENDIDIKAN DAN DEMOKRASI: STUDI KASUS GERAKAN BAD STUDENT DALAM THAI PROTEST 2020

Tessalonika Amanda<sup>1</sup>, I Ketut Putra Erawan<sup>2</sup>, Gede Indra Pramana<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Gerakan *Bad Student* dalam aksi *Thai Protest 2020* sebagai gerakan sosial yang signifikan di Thailand. Menggunakan teori gerakan sosial oleh Charles Tilly, penelitian ini menganalisis bagaimana kelompok pelajar ini memobilisasi diri untuk melawan dominasi pemerintah dan monarki dengan tuntutan reformasi pendidikan dan demokrasi. Data dikumpulkan melalui studi literatur, termasuk jurnal, artikel, buku, media, dan informasi media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan *Bad Student* berhasil membangun identitas kolektif yang kuat dan menggunakan beragam strategi aksi protes yang kreatif dan terorganisir. Para siswa mampu menarik perhatian publik dan mendapat dukungan luas, meskipun menghadapi tindakan represif dari pemerintah. Kesimpulan penelitian ini menyoroti pentingnya solidaritas jaringan, klaim bersama, dan pemanfaatan kesempatan politik dalam keberhasilan gerakan sosial. Gerakan *Bad Student* tidak hanya menyoroti ketidakadilan dalam sistem pendidikan, tetapi juga menegaskan perlunya kebebasan berekspresi dan demokrasi dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk membangun masyarakat yang lebih adil di Thailand.

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

#### Kata Kunci:

gerakan; *Bad Student*; demokrasi; monarki; pendidikan

#### Keywords:

Movement; *Bad Student*; democracy; monarchy; education



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

### ABSTRACT

This paper examines the *Bad Student Movement* in *Thai Protest 2020* as a significant social movement in Thailand. Using Charles Tilly's theory of social movements, this research analyzes how this group of students mobilized against the domination of the government and monarchy with demands for education reform and democracy. Data was collected through a literature study, including journals, articles, books, media, and mass media information. The results showed that the *Bad Student Movement* managed to build a strong collective identity and used a variety of creative and organized protest strategies. The students were able to attract public attention and gain widespread support, despite facing repressive measures from the government. The conclusion of this research highlights the importance of network solidarity, shared claims, and the utilization of political opportunities in the success of social movements. The *Bad Student*



---

*movement not only highlighted injustices in the education system, but also emphasized the need for freedom of expression and democracy in upholding human rights to build a more just society in Thailand.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, Thailand telah mengalami berbagai bentuk krisis politik yang signifikan yang dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan militer PM Prayuth. Selain itu, monarki Thailand dianggap sangat kontroversial sejak naiknya Raja Vajiralongkorn (Rama X) yang sangat represif dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Monarki Thailand memainkan peran sentral dalam struktur kekuasaan untuk menekan kesejahteraan dan kebebasan masyarakat. Kekuasaan monarki diperkuat dengan berlakunya hukum *lèse-majesté* yang secara aktif digunakan menjadi alat politik dalam mempertahankan kekuasaan monarki serta menekan segala bentuk kritik dari masyarakat terhadap monarki.

Pemerintahan militer PM Prayuth berlaku sejak terjadi kudeta militer tahun 2014 yang dipimpin oleh Jenderal Prayuth Chan-Ocha atas nama *National Council for Peace and Order* (NCPO). Kudeta ini berhasil menggulingkan pemerintahan PM Yingluck Shinawatra (2011-2014). Prayuth kemudian naik menjadi PM Thailand pasca pemilu tahun 2014 dan 2019 yang menjadi titik balik dominasi monarki-militer dalam pemerintahan Thailand. Kemunduran demokrasi dan tindak represif berlebih dari pemerintah semakin terlihat pada rezim ini. Pemerintah militer berusaha mengkriminalisasi potensi oposisi dan menghilangkan segala bentuk partisipasi politik masyarakat dari pemerintahan.

Kemunduran demokrasi di Thailand menyulut kemarahan dan ketidakpuasan masyarakat. Kemarahan masyarakat kemudian meledak menjadi sebuah aksi protes, yang terjadi di berbagai penjuru daerah di Thailand pada tahun 2020. Aksi tersebut dikenal dengan nama *Thai Protest 2020* yang dimulai pada Februari 2020. Aksi ini meledak segera setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Thailand untuk membubarkan Partai *Future Forward* (FFP), partai oposisi di parlemen serta aspirasi politik dan demokrasi masyarakat (McCargo, 2021). Beragam kelompok pro-demokrasi melayangkan tuntutan dalam aksi protes yang dilakukan di depan monumen demokrasi Bangkok.

Di antara beragam kelompok pro-demokrasi tersebut, kelompok gerakan *Bad Student* merupakan salah satu kelompok yang menonjol karena keberanian mereka dalam mengemukakan tuntutan secara terbuka dan kreatif. Gerakan *Bad Student* terbentuk dari aliansi aliansi siswa sekolah menengah Thailand yang berasal dari sekitar 50 sekolah yang berbeda. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai isu dalam sistem pendidikan Thailand, yang dianggap tidak hanya ketinggalan zaman namun juga represif. Para siswa melakukan aksi protes untuk menuntut reformasi pendidikan yang mencakup kurikulum yang lebih relevan dan modern, penghapusan propaganda royalis yang mencakup aturan-aturan disiplin yang otoriter, serta penghormatan terhadap hak-hak siswa.



---

Sistem pendidikan Thailand mencerminkan banyak nilai-nilai tradisional yang dianggap sebagai pusat budaya Thailand (Schiller & Liefner, 2007). Salah satu ciri khas pendidikan Thailand di tingkat sekolah menengah dan bahkan tingkat sarjana adalah para siswa dan mahasiswa diwajibkan untuk mengenakan seragam ke kelas. Siswa Thailand di tingkat sekolah dasar dan menengah juga harus mengikuti aturan ketat mengenai panjang dan warna rambut mereka. Secara historis, tujuan dari seragam adalah untuk menanamkan loyalitas terhadap institusi dan bangsa secara keseluruhan melalui penekanan pada identitas kolektif kelompok dan bukan pada perbedaan individu (Feigenblatt et al., 2021).

Selain itu, terdapat sistem hierarki yang ketat di antara para siswa berdasarkan senioritas yang ditegakkan baik oleh guru maupun oleh para siswa itu sendiri (Feigenblatt et al., 2010). Sistem ini mendorong konformitas dan kepatuhan setiap siswa sejak dini yang bertujuan untuk pembentukan norma dan moralitas yang sesuai dengan pemerintah. Para guru diperlakukan dengan penuh hormat dan bahkan terdapat perayaan tahunan bernama *Wai Kru*. Dalam perayaan ini, para siswa harus tunduk dan bersujud di depan guru sebagai bentuk rasa terima kasih atas bimbingan dan dukungan mereka. Persembahan bunga dan makanan disediakan kepada para guru dan para guru kemudian memberkati para siswa. Ritual ini memperkuat hubungan hirarkis antara murid dan guru yang bahkan mempengaruhi cara guru berinteraksi dengan murid dan orang tua mereka di luar sekolah. Sistem pendidikan di Thailand merupakan cerminan dari implementasi propaganda royalis dan hierarki sosial yang ketat (Eldridge & Cranston, 2009).

Propaganda monarki ke dalam ranah pendidikan sudah gencar dilakukan sejak masa pemerintahan Raja Vajiravudh (Rama VI). Pada tahun 1922, Raja Rama VI mengeluarkan hukum kerajaan tentang buku, dokumen, dan jurnal. Dalam pasal 5 hukum kerajaan, dikatakan pemilik atau penulis buku terkait kerajaan yang tidak disetujui oleh kerajaan akan dijatuhi hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun atau denda tidak lebih dari 5.000 baht atau keduanya (Mérieau, 2021). Literatur pendidikan dan buku pada masa itu umumnya hanya ditulis oleh elit kerajaan dan digunakan sebagai sumber utama pendidikan dasar masyarakat Thailand. Hingga awal tahun 1980-an, semua tulisan yang tidak disetujui oleh kerajaan dihancurkan sebab dipandang sebagai ancaman potensial terhadap keamanan nasional. Oleh karena itu, pengaruh moral monarki otoriter sudah melekat sejak kehidupan dini masyarakat.

Dalam era modern, propaganda monarki sudah tidak lagi sesuai dengan cara pikir masyarakat modern. Gerakan *Bad Student* kemudian hadir untuk mendobrak pengaruh propaganda monarki dalam ranah pendidikan. Para siswa menolak untuk tunduk pada hierarki yang sewenang-wenang dan pelecehan di dalam kelas yang dilakukan oleh para guru dan administrator sekolah. *Bad Student* menuntut untuk diakhirinya segala bentuk pelecehan terhadap siswa yang menuntut demokrasi dan adanya pencabutan peraturan-peraturan sekolah yang kejam dan mengikat siswa.

Tuntutan *Bad Student* tidak terbatas dalam ranah pendidikan saja. Para siswa juga menentang berlakunya hukum *lèse-majesté*, yang digunakan secara luas untuk menekan kritik



---

terhadap monarki dan pemerintah, serta menuntut reformasi politik yang lebih luas untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis dan inklusif. Penerapan undang-undang *lèse-majesté* yang semakin intensif di bawah pemerintahan militer yang dipimpin oleh PM Prayuth sejak kudeta militer tahun 2014, telah menimbulkan ketakutan dan ketidakpuasan yang meluas. Hukum ini secara aktif digunakan untuk membungkam oposisi dan menekan kebebasan berekspresi masyarakat. Ketidakpuasan ini diperparah dengan naiknya Raja Vajiralongkorn ke tahta, yang dianggap oleh banyak orang tidak sekompeten raja sebelumnya, serta berbagai rumor negatif yang mengelilinginya. Akibatnya, kritik terhadap monarki dan penerapan hukum *lèse-majesté* semakin meningkat yang menyebabkan adanya kemunduran demokrasi di negara Thailand.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait peran krusial Kelompok *Bad Student* dalam gerakan sosial kontemporer di Thailand. Siswa sekolah menengah, sebagai bagian dari generasi muda, memiliki potensi besar untuk mengubah dinamika politik dan sosial di negara mereka. Namun, peran mereka sering kali diabaikan dalam analisis penelitian gerakan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi, strategi, dan dampak dari gerakan *Bad Student* sebagai bagian dari gerakan pro-demokrasi yang meledak di Thailand pada tahun 2020. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis dan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada literatur tentang gerakan sosial, khususnya dalam konteks Thailand dan menawarkan wawasan praktis bagi aktivis dan pembuat kebijakan yang bekerja untuk mempromosikan demokrasi dan reformasi di negara tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan memperkaya pemahaman pembaca tentang peran siswa dalam gerakan sosial dan menjadi agen perubahan yang signifikan dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial oleh Charles Tilly, yang menawarkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana gerakan sosial dapat muncul, berkembang, dan mempengaruhi perubahan sosial. Tilly menyoroti pentingnya mobilisasi sumber daya, peluang politik, dan identitas kolektif dalam keberhasilan gerakan sosial. Dengan menganalisis Gerakan *Bad Student* melalui lensa teori ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang dinamika gerakan sosial di Thailand dan bagaimana kelompok-kelompok yang terpinggirkan dapat memobilisasi sumber daya mereka untuk menantang kekuasaan yang mapan. Permasalahan kunci yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi faktor pendorong yang membuat siswa bergabung dalam Gerakan *Bad Student*, strategi dan taktik yang digunakan oleh gerakan ini, serta dampaknya terhadap Gerakan *Thai Protest* 2020 dan kebijakan pemerintah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Gerakan sosial, sesuai perspektifnya, dapat digambarkan sebagai kesatuan kolektif suatu kelompok atau organisasi yang memiliki pemahaman sadar tentang hak-hak dasar mereka yang secara signifikan sangat dipengaruhi oleh otoritas kelompok dominan yang memegang



kekuasaan dalam suatu negara. Menurut Charles Tilly (2004), secara garis besar, gerakan sosial adalah bentuk tindakan kolektif yang terorganisir dan terus-menerus dilakukan oleh kelompok atau organisasi yang berusaha untuk mencapai perubahan sosial atau politik. Tilly mengembangkan teori tentang gerakan sosial dengan menekankan pada beberapa elemen penting, yakni gerakan sosial melibatkan klaim bersama yang dibuat oleh sekelompok orang terhadap pihak yang berkuasa atau institusi, seringkali berkaitan dengan keadilan, hak-hak, atau perubahan kebijakan. Aksi yang terorganisir adalah karakteristik utama dari gerakan sosial, di mana demonstrasi, protes, kampanye media, atau bentuk lain dari mobilisasi massa direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis.

Pengertian tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Macionis. Menurut Macionis, gerakan sosial adalah upaya terstruktur dengan tujuan mengadvokasi atau mencegah perubahan sosial. Dalam hal ini, gerakan sosial menekankan pentingnya adanya tindakan yang terorganisir dan bertujuan utama untuk membentuk perubahan sosial (Macionis, 1999). Gerakan sosial umumnya muncul sebagai tanggapan terhadap bentuk penindasan atau ketidakadilan yang dialami oleh sekelompok orang, baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Jaringan dan solidaritas memainkan peran penting dalam gerakan sosial dengan melibatkan individu dan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jaringan ini dapat terdiri dari organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, dan individu dengan kepentingan yang sama.

Tilly juga menyebutkan bahwa gerakan sosial memiliki aksi repertoar yang merujuk pada berbagai strategi untuk mengekspresikan tuntutan dan menarik perhatian publik serta pihak yang berwenang. Identitas kolektif sering kali berkembang di antara anggota gerakan sosial, memperkuat rasa solidaritas dan komitmen terhadap tujuan gerakan. Tilly menekankan pentingnya kesempatan politik dalam keberhasilan gerakan sosial, mengacu pada situasi ketika struktur politik dan peluang yang terbuka memungkinkan gerakan sosial lebih efektif dalam mencapai tujuannya (Tilly et al., 2004). Dalam kerangka teori gerakan sosial oleh Tilly, Gerakan *Bad Student* dalam *Thai Protest 2020* dapat dianalisis dengan melihat bagaimana klaim gerakan tersebut terhadap reformasi pendidikan dan demokrasi diorganisir serta bagaimana membangun jaringan solidaritas, dan memanfaatkan kesempatan politik yang ada untuk mencapai perubahan yang diinginkan.

### 3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yakni studi pustaka mencakup pencarian dan analisis yang cermat terhadap sumber literatur yang ada, termasuk artikel ilmiah, buku, dan studi kasus (George, 2008). Sumber data penelitian ini berasal dari literatur terdahulu seperti, buku, jurnal, artikel serta informasi media massa. Data dalam penelitian ini dikumpulkan secara kolektif kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan perspektif yang beragam terkait praktik gerakan sosial terutama peran gerakan *Bad Student* dalam melakukan gerakan perlawanan terhadap dominasi monarki dan pemerintahan PM Prayuth.



---

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2020, Thailand telah menjadi sorotan dunia dan ramai diperbincangkan oleh berbagai media internasional karena masifnya aksi protes dari gerakan prodemokrasi yang menuntut adanya reformasi monarki. Beragam kelompok pro-demokrasi melakukan aksi protes terbesar dalam sejarah Thailand dan dilakukan di depan monumen demokrasi Bangkok. Dilansir oleh BBC News (2020), aksi protes pro-demokrasi ini dalam puncaknya berhasil menarik sekitar 50.000 - 100.000 demonstran demi menuntut adanya reformasi secara keseluruhan menuju negara yang lebih demokratis.

Di antara beragam kelompok pro-demokrasi yang hadir, kelompok gerakan *Bad Student* merupakan salah satu kelompok yang menonjol karena didominasi oleh siswa yang notabene masih di bawah umur dan keberanian mereka dalam mengemukakan tuntutan secara terbuka dan kreatif. Gerakan *Bad Student* terbentuk dari aliansi siswa sekolah menengah yang berasal dari sekitar 50 sekolah menengah atas di Thailand. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap berbagai isu dalam sistem pendidikan Thailand, yang dianggap sangat otoriter dan juga represif. Para siswa melakukan aksi protes untuk menuntut reformasi pendidikan yang mencakup kurikulum yang lebih relevan dan modern, penghapusan propaganda royalis yang mencakup aturan-aturan disiplin yang otoriter, serta penghormatan terhadap hak-hak siswa.

Selain mendukung tujuan yang lebih luas dari aksi protes anti-pemerintah, gerakan *Bad Student* melayangkan aksi protes untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pendidikan otoriter yang dianggap sudah tidak lagi relevan di zaman modern. Ideologi royalisme telah menjadi dasar dan melekat di seluruh sistem pendidikan Thailand. Lagu kebangsaan dimainkan pada apel pagi, terdapat aturan terkait seragam dan perilaku yang sangat ketat, dan siswa diharapkan untuk tidak mempertanyakan otoritas pemerintah. Para aktivis prodemokrasi mengatakan bahwa sistem sekolah Thailand lebih ditujukan untuk menanamkan 'kepatuhan terhadap monarki' daripada memberikan pendidikan (Kittisilpa, 2020).

Pada bulan Juni 2020, aksi protes simbolis *Bad Student* ramai dengan meminta masyarakat yang lewat di jalan untuk memotong rambut mereka sebagai bentuk protes atas tindakan otoriter para guru sekolah (Sibplang, 2020). Sejak saat itu, jaringan kelompok *Bad Student* semakin meluas dengan beragam strategi protes para siswa yang kreatif. Dalam skala nasional aliansi para siswa sekolah semakin ramai sampai mencapai setidaknya siswa di 200 sekolah di seluruh Thailand telah bergabung dalam aksi protes ini (Lertchoosakul, 2021).

Pada Agustus 2020, aksi gerakan *Bad Student* semakin memanas. Para siswa beramairamai mengenakan pita putih dan mengacungkan salam tiga jari yang terinspirasi dari film *The Hunger Games* saat lagu kebangsaan dinyanyikan di pagi hari untuk mendukung gerakan prodemokrasi. Aksi salam tiga jari telah menjadi simbol seruan demokratis dan anti-kediktatoran sejak PM Prayuth pertama kali mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun 2014. Aksi tiga jari juga menggambarkan tiga tuntutan utama dalam demonstrasi *Thai Protest 2020*, yakni (1) pengunduran diri PM Prayuth dan pembubaran parlemen; (2) reformasi



konstitusi 2017 yang disusun oleh rezim NCPO; dan (3) penghentian kekerasan, penangkapan, dan intimidasi terhadap masyarakat dan aktivis (Haberkorn, 2021). Pita putih yang dikenakan di tangan melambangkan kesucian hati para siswa. Para siswa sekolah menengah di Thailand melakukan aksi protes untuk melawan sistem pendidikan otoriter yang telah melanggar HAM para siswa di Thailand.

Selanjutnya, kelompok siswa yang semakin membesar atas nama *Bad Student* melakukan aksi protes di depan gedung Kementerian Pendidikan Thailand untuk melayangkan tuntutan terhadap Menteri Pendidikan, Nuttapol Teepsuwan pada September 2020. Nuttapol dianggap gagal dalam menyelesaikan masalah dugaan pelecehan dan kekerasan terhadap siswa di sekolah. Dugaan pelecehan terhadap siswa oleh guru telah menjadi isu yang kontroversial dan menarik perhatian masyarakat, setelah seorang guru di Sekolah Sarasat di provinsi Nonthaburi, diduga melakukan pelecehan terhadap beberapa siswa taman kanak-kanak, yang memicu kemarahan publik. Guru yang bersangkutan kemudian telah diberhentikan dan menghadapi tuduhan penyerangan, yang diajukan ke polisi Nonthaburi. Berdasarkan data *Thai Lawyers for Human Rights (TLHR)* (2020), jumlah pengaduan yang diterima TLHR dari berbagai saluran serta kasus-kasus yang dipantau melalui laporan media dan LSM secara keseluruhan, terdapat 103 siswa yang mengalami pelecehan oleh guru, sekolah, perguruan tinggi, atau pejabat negara.

Belakangan diketahui bahwa banyak guru di sekolah yang tidak memiliki izin mengajar, termasuk beberapa guru yang telah diberhentikan dalam kasus-kasus terakhir. Rekaman yang memperlihatkan guru-guru yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anak ramai di sosial media. Rekaman tersebut memicu kemarahan dan seruan untuk pemerintah segera mengambil tindakan terhadap sekolah-sekolah tersebut. Seiring dengan meningkatnya protes, kelompok *Bad Student* juga mengupayakan reformasi terhadap monarki yang berkuasa. Para siswa aktivis melakukan konvoi dengan truk dan mengunjungi beberapa sekolah, yaitu Samsen Wittayalai, Triam Udomsueksa, Santo Yoseph, Thepsirin, dan Wat Ratchabopit, lalu kemudian beramai-ramai melakukan aksi protes terhadap Kementerian Pendidikan Thailand (Phasuk, 2020).

Dari balik gerbang gedung Kementerian Pendidikan Thailand, para siswa menyerukan tuntutan, menyanyikan lagu-lagu yang mengejek peraturan sekolah dan mengacungkan salam tiga jari. Para siswa juga ramai memasang tanda di gerbang yang bertuliskan "Guru-guru di sekolah melecehkan murid-murid!". Aktivis utama dari kelompok *Bad Student* terus menyerukan pengunduran diri Menteri Pendidikan Nuttapol Teepsuwan dari atas truk dengan menggunakan pengeras suara sambil melemparkan ribuan salinan surat pengunduran diri palsu dari menteri ke udara (Kuhakan & Setboonsarng, 2020).

Di tengah situasi panas aksi protes, pembatasan kegiatan siswa menjadi sangat luas. Sekolah telah menjadi tempat yang tidak aman sebagai akibat dari penyalahgunaan oleh elit-elit yang berkuasa di berbagai tingkatan, sementara penyelidikan terhadap masalah ini sulit dilakukan. Guru-guru di beberapa sekolah menggunakan kekerasan untuk menghentikan aksi protes para siswa di sekolah. Salah satu kasus serius melibatkan sebuah sekolah di provinsi



---

Nakhon Sawan pada 17 Agustus 2020, ketika seorang guru memarahi para siswa yang sedang melakukan salam tiga jari dengan kata-kata kasar, kemudian melempar ponsel siswa yang merekam aksi kekerasan tersebut. Guru tersebut juga menekan para murid untuk menghapus segala bentuk rekaman yang menunjukkan tindak kekerasan di sekolah.

Dalam hal ini, pemerintah juga merespon aksi protes *Bad Student* dengan tindak represif. Aparat keamanan dikerahkan untuk menghentikan aksi protes di beberapa sekolah dan di Monumen Demokrasi Bangkok. Terlihat polisi yang menggunakan gas air mata, water canon, dan beberapa tindak kekerasan fisik lainnya untuk memukul mundur aksi para siswa. Dilansir dari Bangkok Post, puncak tindak represif aparat ditunjukkan ketika terdapat enam orang siswa yang terkena luka tembak dari polisi. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menghentikan aksi protes gerakan *Bad Student* ini.

Ploy, salah satu pemimpin *Bad Student*, mengatakan bahwa aksi protes ini akan terus berlanjut dan para siswa tidak lagi takut dengan pemerintahan otoriter yang represif. Para siswa tidak lagi terima diperlakukan seperti 'anak kecil yang tidak tahu apa-apa' dan melepaskan diri dari pengaruh propaganda royalis yang telah mencuci otak mereka untuk menjadi 'robot' yang menghormati monarki otoriter (Lertchoosakul, 2021).

Pada tanggal 1 Desember 2020, para siswa kembali berhasil menggelar aksi protes dengan tema "tanpa seragam" secara nasional. Para siswa mengkritik peraturan sekolah otoriter sekolah terkait penampilan siswa. Dalam aksi ini, para siswa menggaungkan "*Kuku saya, rambut saya, tubuh saya, tapi entah bagaimana pilihan saya mengganggu para guru, jadi ucapkan selamat tinggal pada seragam pada tanggal 1 Desember!*" (เสียดผมครู ่างกายกูแต่ไปหนักหัวครู1 ธันวาคม บอกลาเครื่องงแบบ). Para aktivis mendorong para siswa di seluruh Thailand untuk mengenakan pakaian pribadi yang secara simbolis sebagai aksi penolakan dan pengembalian seragam sekolah mereka kepada Kementerian Pendidikan.

Ratusan siswa di seluruh negeri melakukan aksi protes terhadap nilai konservatif dan otoriter dari sistem pendidikan dengan pergi ke sekolah tanpa seragam. Dengan melakukan aksi pemberontakan di salah satu institusi sosial paling konservatif di Thailand, para siswa ini menghadapi respon represif dari para guru dan kaum konservatif. Para petinggi dan administrasi sekolah serta pihak berwenang memerintahkan para siswa untuk berhenti. Para siswa juga diancam adanya mengurangi nilai bahkan hingga mengalami kekerasan. Beberapa otoritas sekolah juga mengizinkan polisi untuk menginvasi sekolah dan menindak lanjuti setiap siswa yang tidak berseragam.

Para siswa menganggap bahwa sekolah merupakan instansi kediktatoran pertama dalam hidup mereka, dengan struktur dari atas ke bawah dan operasi otoriter yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Budaya otoriter para guru dan administrator sekolah, aturan-aturan otoriter dan tidak lagi relevan dengan tuntutan modern yang mengatur segala sesuatu mulai dari pakaian hingga panjang rambut, diskriminasi terhadap siswa LGBTQ, metode pembelajaran hafalan yang tidak inspiratif - semua hal tersebut adalah masalah. Kelompok *Bad*



---

*Students* percaya bahwa aksi protes mereka untuk menuntut reformasi pendidikan adalah bagian dari aksi politik yang lebih luas untuk mengakhiri pemerintahan otoriter di Thailand.

Aksi protes *Bad Student* semakin meluas dan ramai didukung masyarakat. Para siswa berpidato di atas panggung dan mengadakan aksi protes pro-demokrasi mereka secara kreatif sejalan dengan gerakan aksi *Thai Protest 2020* yang memiliki tuntutan yang lebih luas. Puluhan ribu pengunjuk *Thai Protest 2020* menyerukan pembubaran parlemen, reformasi konstitusi baru, dan menuntut adanya penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Kelompok *Bad Student* menunjukkan perannya sebagai salah satu kelompok intelektual dalam aksi *Thai Protest 2020* demi menuntut tujuan bersama, yakni reformasi monarki. Dalam hal ini, gerakan *Bad Student* menunjukkan pentingnya adanya tindakan yang terorganisir dan bertujuan utama untuk membentuk perubahan sosial. Aksi protes yang berjalan sepanjang tahun 2020 ini hadir sebagai respon masyarakat terhadap bentuk penindasan dan ketidakadilan yang dilanggengkan oleh pemerintah PM Prayuth dan Raja Vajiralongkorn.

Gerakan *Bad Student* di Thailand merupakan contoh signifikan dari mobilisasi gerakan sosial yang berusaha melawan dominasi pemerintah dan monarki melalui upaya reformasi pendidikan dan demokrasi. Berdasarkan teori gerakan sosial Charles Tilly, gerakan ini menunjukkan karakteristik penting dari sebuah gerakan sosial, yakni klaim bersama, tindakan terorganisir, solidaritas jaringan, repertoar aksi, identitas kolektif, dan pemanfaatan kesempatan politik. Gerakan *Bad Student*, yang dipelopori oleh para siswa, berhasil membangun identitas kolektif yang kuat dengan menuntut perubahan sistem pendidikan yang lebih demokratis dan inklusif. Para siswa menggunakan beragam strategi, termasuk demonstrasi, kampanye media, dan protes kreatif, untuk menarik perhatian publik dan menekan pihak berwenang. Gerakan ini juga memperlihatkan bagaimana kesempatan politik, seperti ketidakstabilan politik dan ketidakpuasan umum terhadap pemerintah dan monarki, dimanfaatkan untuk memperkuat tuntutan. Meskipun menghadapi tindakan represif dari pemerintah, Gerakan *Bad Student* mampu menarik dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat, menunjukkan kekuatan solidaritas dan jaringan dalam mencapai tujuan gerakan sosial.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

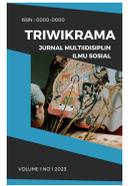
Gerakan protes siswa sekolah menengah di Thailand atas nama *Bad Student* pada tahun 2020 telah menghasilkan sebuah gerakan sosial nasional yang mengajukan tiga tuntutan utama: mereformasi konstitusi, membubarkan parlemen dan menjadwalkan pemilihan umum baru, dan mereformasi monarki. Para siswa sekolah menengah Thailand tidak hanya menyerukan demokrasi dalam aksi politik formal, tetapi juga kritis terhadap norma-norma dan institusi konservatif dalam sistem pendidikan. Aksi protes simbolis nasional yang dilakukan, berupa salam tiga jari sambil menyanyikan lagu kebangsaan, mengenakan pita putih, dan menentang seragam sekolah telah mengguncang dasar-dasar masyarakat Thailand. Para siswa telah menjadi peserta garis depan dalam berbagai protes, terutama di lokasi-lokasi di pedalaman.



Pada akhirnya, penindasan negara melalui beragam hukum represif dan propaganda royalis terhadap kebebasan berekspresi telah membuat para siswa sekolah menengah berdiri dan mencoba melindungi hak-hak politik mereka. Gerakan *Bad Student* di Thailand adalah manifestasi nyata dari dinamika gerakan sosial yang kompleks, menggambarkan perjuangan kolektif untuk keadilan sosial dan perubahan struktural dalam konteks politik yang menantang. Gerakan ini tidak hanya menyoroti ketidakadilan dalam sistem pendidikan, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya kebebasan berekspresi dan demokrasi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- BBC News. (2020, September 20). Thailand protests: Thousands join huge rally demanding reforms. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-54217284>
- Eldridge, K., & Cranston, N. (2009). Managing transnational education: Does national culture really matter? *Journal of Higher Education Policy and Management*, 31(1), 67–79. <https://doi.org/10.1080/13600800802559286>
- Feigenblatt, Pardo, P., & Cooper, M. (2021). The “*Bad Students*” Movement and Human Rights in Contemporary Thailand. *Revista Ciencias Sociales y Económicas*, 5(1).
- Feigenblatt, O. F. Von, Suttichujit, V., Shuib, M. S., & Keling, M. F. (2010). Weapons of Mass Assimilation: A Critical Analysis of the use of Education in Thailand . *Journal of Asia Pacific Studies*, 1(2), 292–311.
- George, M. W. (2008). *The Elements of Library Research What Every Student Needs to Know*. Princeton University Press.
- Haberkorn, T. (2021). Under and beyond the Law: Monarchy, Violence, and History in Thailand\*. *Politics and Society*, 49(3), 311–336. <https://doi.org/10.1177/00323292211033073>
- Kuhakan, Jiraporn & Setboonsarng, Chayut. (2020, Oktober 02). Thailand's '*Bad Students*' demand minister's resignation, reforms. Reuters. Diakses dari <https://www.reuters.com/article/idUSKBN26N1L2/>
- Lertchoosakul, K. (2021). The white ribbon movement: high school students in the 2020 Thai youth protests. *Critical Asian Studies*, 53(2), 206–218. <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1883452>
- McCargo, D. (2021). Disruptors' Dilemma? Thailand's 2020 Gen Z Protests. *Critical Asian Studies*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1876522>
- Mérieau, E. (2021). A History of the Thai *Lèse-majesté* Law. *Thai Legal History*, 77–88. <https://doi.org/10.1017/9781108914369.007>
- Phasuk, Sunai. (2020, September 17). Thailand's '*Bad Students*' are rising up for democracy and change. *Washington Post*. Diakses dari <https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/09/17/thailands-bad-students-are-rising-updemocracy-change/>



- 
- Schiller, D., & Liefner, I. (2007). Higher Education Funding Reform and University-Industry Links in Developing Countries: The case of Thailand. *Higher Education*, 54(4), 543–556. <https://doi.org/10.1007/s10734-006-9011-y>
- Sibplang, Ployrung. (2020, Juni 30). #เลิกบังคับหรือจับตัด : The feeling of students imprisoned under authoritarianism in schools. *The Matter*. Diakses dari <https://thematter.co/social/hairstyle-and-authoritarianism-in-school/116163>
- Tilly, C., Castañeda, E., & Wood, L. J. (2004). *SOCIAL MOVEMENTS, 1768–2018* (First Edit). Paradigm.
- TLHR. (2020, Agustus 25). Students making three-finger salute wearing white bows led to 103 reports of harassment in 3 days. Diakses dari <https://tlhr2014.com/en/archives/20794?lang=en>